

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, J.E. 2003. *Public Policymaking An Introduction Fifth Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Birkland, T.A. 2015. *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making Third Edition*. New York: Routledge.
- Handoyo, E. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Widya Karya.
- Kadji, Y. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Faktas Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Siyoto, S, Ali S. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2013. *Metode Peneliian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ripley, R.B dan Franklin, G.A. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy Second Edition*, California: The Dorsey Press.
- Ripley, R.B. 1985. *Policy Analysis in Political Science*, Chicago: Nelson-Hall Publishers.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- _____. 1999. *Report of The Consultation on Child Abuse Preventionation WHO, Geneva, 29-31 March 1999*. Switzerland: World Health Organization.

Jurnal dan Skripsi

- Arpin, Andi, A., Andi, M.I. 2022. *Analisis Terhadap Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6 (1), 2066-2076.
- Havif, K. 2020. *Pelaksanaan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Luhak Nan Tuo Dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2018*. JOM FISIP, Vol. 7 (2), 1-15.
- Juliana, R, Ridwan, A. 2019. *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*. Jurnal Selat, Vol 6 (2), 225-234.
- Melati, D.P. 2015. *Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. Fiat Jurtisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9(1), 33-48.
- Roria, R. 2019. *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung)*. SAKINA: Journal of Family Studies, Vol 3(3), 1-9.
- Sari, N.P, Suasti, Y. 2020. *Kekerasan Terhadap Anak di Kota Padang*. Jurnal Buana, Vol. 4 (2), 487-493.
- Setyawati, R. 2019. *Pengelolaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*. Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Vol. 3 (2), 103-118.
- Sholamita, I. 2021. *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan*. Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan.

Dokumentasi

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 2021. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020*. Padang.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 2022. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021*. Padang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 2023. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022*. Padang.

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Kelembagaan dan Tenaga Administrasi Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pembina, Koordinator, Tenaga Ahli Psikolog dan Administrasi Pelaksana Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Basamo Kota Padang

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penunjukan Penyuluh/Pendamping Non PNS Untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Padang Pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penunjukan Tenaga Psikolog/Konseler dan Tenaga Administrasi Non PNS Untuk Layanan Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Basamo Pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2023

Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2021.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Atas Anak.

Perjanjian Kerjasama Antara Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dan Woman Crisis Cnter (WCC) Nurani Perempuan tentang Kerjasama Dalam Penanganan dan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Tahun 2019-2024.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Lainnya

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/41/4000/infografis-snphar-2021>

<https://info.padang.go.id/lewat-berbagai-program-dp3ap2kb-padang-harapkan-tak-ada-lagi-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1400/memperkuat-pencegahan-kekerasan-terhadap-anak-melalui-puspaga>

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

<https://www.pinhome.id/blog/peta-padang/>

